

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Atma Ras

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Secara umum kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, social, budaya dan politik.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan rezim Orde Baru maupun pemerintahan Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan, dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan top down maupun pendekatan bottom up, serta merumuskan berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi program. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Ketidakberdayaan, Program dan Strategi

I. Pendahuluan

Fenomena kemiskinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari forum-forum diskusi, seminar, talk show, dengan tawaran gagasan dari berbagai kalangan, baik para akademisi, pakar, praktisi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Berbagai teori, konsep dan pendekatan dikembangkan, dirumuskan untuk menyibak tirai misteri kemiskinan. Namun sampai saat ini, persoalan kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan

krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kondisi ini merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pecahannya melalui berbagai pendekatan.. Karena itu, setiap upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit bahwa problema kemiskinan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan dimensi sosial, budaya, juga politik. sebagai sumber kemiskinan.

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati

kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau stakeholder untuk mengatasi persoalan besar ini.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde Baru maupun pada Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, faktanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap ada.

II. Kajian Pustaka

2.1. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya mencakup persoalan materi saja, namun juga masalah-masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang multidimensi, maka kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun definisi kemiskinan dari beberapa dimensi, dikemukakan dibawah ini (Nugroho dalam Sunartiningsih,2004:80) adalah:

1. Kemiskinan berdimensi ekonomi

- Kemiskinan Absolut, suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

- Kemiskinan Relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun secara relative pendapatannya masih dibawah rata-rata penduduk sekitarnya.

2. Kemiskinan berdimensi Sosial-Budaya

- Kemiskinan Kultural, suatu kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, fatalistik dan sebagainya.

3. Kemiskinan Berdimensi Struktural atau Politik.

- Kemiskinan struktural atau Politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain. Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah

dalam merespon peluang ekonomi. Ketidakberdayaan ranah politik dapat dilihat dari kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya posisi tawar dalam membela hak politik sehingga terjadi diskriminasi. Sementara ketidakberdayaan secara sosial ditandai dengan rendahnya akses terhadap informasi dan pelayanan sosial, lemahnya interaksi sosial sehingga masyarakat menjadi termarginalkan. Kemudian ketidakberdayaan kultural ditandai dengan lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai kultural terhadap usaha peningkatan kondisi kehidupan.

Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin akan dihindangi rasa malas, apatis, memiliki sikap dependency atau ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemandirian untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih baik.

2.2. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pengentasan Kemiskinan

Selama ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan kemiskinan belum membuahkan hasil yang

memuaskan. Menurut (Setiadi dan Kolip, 2010:834-835) bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, pemberian beras miskin serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah, tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, menjadikan mereka selalu bergantung baik budi pemerintah tanpa harus bekerja keras untuk merubah nasib. Masyarakat akan terkena virus penyakit psikososial yaitu malas bekerja, fatalistik, manja, rasa bergantung terhadap pemerintah cukup tinggi.

2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara local. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil survey sosial dan ekonomi nasional (Susenas) oleh BPS dan

data mikro hasil pendaftaran pra sejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya data dan informasi seperti tidak dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai Negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi social, sifat budaya maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara local.

Ketidakberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, selain disebabkan faktor bantuan social yang tidak mendidik masyarakat miskin, juga cara pemahaman yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik bahwa kemiskinan disebabkan sebuah kondisi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek social, budaya dan politik masyarakat. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lebih berorientasi pada perbaikan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Mengatasi kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi, social, budaya dan politik. Masyarakat miskin seyogyanya diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumber-sumber daya yang dapat

menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, program bantuan seharusnya difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa anggungan pada masyarakat miskin, juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian. Dengan demikian, secara bertahap, masyarakat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah.

III. Pembahasan

3.1. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Bicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa menggelisahkan pada era yang sudah semakin canggih, kemiskinan masih saja tetap dominan.

Kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, disatu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia, sementara dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia masih terbelenggu kemiskinan dari berbagai lini kehidupan.

Secara Sosiologis sejarah menunjukkan bahwa pembangunan di Era Orde Baru, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan aspek-aspek social, budaya dan politik. Pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Kita tidak menafikan, pemerintah di rezim Orde Baru melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) meliputi: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan kesejahteraan Keluarga (Takesra), serta Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Orientasi sasaran IDT, Takesra Kukesra adalah masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun sasaran program sama yaitu penduduk miskin, akan tetapi jika dilihat secara khusus terdapat perbedaan wilayah sasaran antara IDT, Takesra dan Kukesra. IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di desa-desa tertinggal, sedangkan Takesra dan Kukesra Memiliki sasaran Pnduduk miskin yang berada diluar lokasi desa tertinggal (Sulistiyani,2004:8).

Kebijakan program pemerintah di era Orde Baru dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal karena program tersebut selain tidak mampu memberikan outcome bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pendekatan yang digunakan adalah top down yang segalanya bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan saja.

Pendekatan top-down yang sifatnya sentralistik, dimana segala kebijakan pemerintah sangat terpusat. Ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, ketidakmampuan melakukan control terhadap berbagai kebijakan program, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat Pendekatan ini, juga tidak memperhatikan aspek sosial, budaya, perbedaan potensi wilayah, baik secara geografis maupun demografis, kemampuan kualitas sumber daya manusia yang berbeda antar wilayah, yang pada akhirnya produk-produk pembangunan tidak mencapai sasaran sehingga program pembangunan hanya mubazir dan mengabaikan asas manfaat bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru, pemerintah di rezim Reformasi, merumuskan berbagai kebijakan program bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan beras miskin, bantuan langsung tunai, pemberian bantuan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas), bantuan dana operasional sekolah (Bos) dengan beasiswa untuk orang miskin, bantuan bibit dan pupuk gratis untuk masyarakat petani, program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan kecamatan (PPK) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut diatas, pemerintah menggunakan pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang dianggap cukup ideal dalam pembangunan

dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, aspirasi masyarakat dan memposisikan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat miskin harus berorientasi pemberdayaan.

Secara konseptual, menurut (Suharto,2005:58) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment, berasal dari kata 'Power'(kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Nugroho, 2001:195-197) yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bika berhadapan dengan struktur social dan politis.
2. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.

3. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
4. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
5. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
6. Redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah rezim Reformasi dalam rangka pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun harus diakui bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16, 66% atau 37,2 juta orang pada tahun 2004 menjadi 28,07 juta atau 11, 37 persen dari total penduduk Indonesia. Penurunan angka kemiskinan antara lain didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9, 86% pada tahun 2004 menjadi 5,92% pada bulan Maret ditahun 2013.

Secara Kuantitas, pemerintah berhasil menurunkan jumlah angka kemiskinan, tetapi dari aspek kualitas (social, budaya dan politik) masyarakat masih terbelenggu dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan merupakan proses panjang yang

memerlukan penanganan yang terpadu, berkelanjutan dengan melibatkan semua elemen-elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah level bawah, sehingga program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan terwujud.

IV. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi bahwa selama ini bangsa Indonesia belum pernah terbebas dari kemiskinan.

Pemerintahan di Era Orde Baru cenderung menggunakan pendekatan top-down dalam melaksanakan program pembangunan. Masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, sehingga mematikan segala potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat, pada akhirnya kesenjangan semakin lebar antara masyarakat kaya dan miskin.

Sementara pemerintahan pada rezim Reformasi, belajar dari pengalaman sejarah, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah senantiasa bertumpu pada pendekatan Bottom-up, dimana masyarakat diposisikan sebagai subyek atau aktor pembangunan, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan dalam pengentasan kemiskinan selama ini, karena adanya pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan itu sendiri. Penyebab kemiskinan adalah semata-mata faktor ekonomi, sehingga cenderung program yang ditawarkan untuk memperbaiki peningkatan pendapatan masyarakat, dengan mengabaikan aspek-aspek lain seperti aspek social, budaya dan politik yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat miskin.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, social, budaya dan politik.

Daftar Pustaka

- Nugroho, Heru. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. 2001. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setiadi, Elly M. & Usma Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi; pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta : Prenada Media Group.
- Suharto, edi. Membangun Masyarakat

Memberdayakan masyarakat. 2005.
Bandung: PT. Refika Aditama.

Sunartiningsih, Agnes (ed). 2004.
Memberdayakan Masyarakat Desa
Melalui Institusi Lokal. Yogyakarta :
Aditya Media.

Sukmana, Oman. 2005. Sosiologi dan Politik
Ekonomi. Malang: UMM Press.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan

Model-Model Pemberdayaan.
Yogyakarta: Gava Media

Sumber Lain :

www.Investor.co.id/pages/index/m-index.php

Akses, 23 Oktober 2013